

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Amidun Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2014.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, 2012.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 1998.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Garfinso Persada, 2011.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonsia*, Jakarta, PT Raja Garfinso Persada. 2010.
- Siswanto Sunarmo, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Soejono, Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2008.
- Sri Pudystmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, 2011.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha ilmu, 2002.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafiks, Jakarta, 2011.
- Sri Pudystmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, 2011.
- Dinas BAPEDA Kabupaten Sijunjung, *Profil Daerah Kabupaten Sijunjung*, Sumatera Barat, 2012.
- Profil Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 disusun oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (MINERBA).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Organisasi dan Tata Kerja Satun Polisi Pamong Praja..

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Surat Keputusan Gubernur Sumatera barat Nomor : 180-149-2017 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penegak Produk Hukum Daerah Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

## **C. Website**

<https://ippemkes1971.wordpress.com/2012/06/02/mengenal-sijunjung-lebih-dekat> Di akses pada tanggal 10 Februari 2017.

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> Di akses pada tanggal 22 Februari 2017

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/10/17/kepala-daerah-tak-boleh-keluarkan-izin-tambang> Di akses pada tanggal 25 April 2017

<https://www.sijunjung.go.emai : pdet@sijunjung.go.id> di akses pada tanggal 28 September 2017